

ABSTRAK

Desy Rosanti. 2019. E0015103. PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL SEWA RAHIM (*SURROGACY*) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, *pertama*, bagaimanakah ketentuan sewa rahim (*surrogacy*) berdasarkan hukum di Indonesia, *kedua*, bagaimanakah status hukum dan hak-hak anak hasil sewa rahim (*surrogacy*) tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia sudah terdapat aturan yang melarang adanya praktek sewa rahim baik secara implisit maupun secara eksplisit. Peraturan yang ada belum secara jelas mengatur sewa rahim, hanya sekedar melarang namun tidak diberikan sanksi sebagai antisipasi bila ada pihak yang melakukannya. Selain itu belum sempurna dan belum lengkapnya peraturan yang mengatur sewa rahim di Indonesia, menimbulkan permasalahan terkait status hukum dan hak anak hasil dari sewa rahim, yang mana sekarang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara umum.

Kata Kunci: Sewa Rahim, Status Hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ABSTRACT

Desy Rosanti. 2019. E0015103. LEGAL PROTECTION OF SURROGACY CHILD ACCORDING TO LAW IN INDONESIA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

This study describes and examines the problems, first, how are the provisions for surrogacy based on the law in Indonesia, and second, how is the legal status and rights of the child resulting from surrogacy.

This research is a prescriptive normative study. Secondary data types include primary and secondary legal materials. The data collection technique used is a literature study and the technical analysis used is the deductive method.

The results of the study show that in Indonesia, there are rules that prohibit the existence of surrogacy either implicitly or explicitly. The existing regulations have not clearly regulated surrogacy, only forbid but there is not sanctioned in anticipation if there are parties who do it. Besides that, the imperfect and incomplete regulations governing surrogacy in Indonesia have caused problems related to the legal status and rights of the children resulting from the surrogacy, which is still referring to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Child Protection Act.

Keywords: Surrogacy, Legal Status, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage